



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-07/2026

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-07/2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN	PEMRAKARSA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penetapan dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Badan Usaha Milik Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Pengelolaan Data Geospasial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
11	Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	Sistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (<i>Corporate Univercity</i>)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

13	Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2044	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2044	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 
ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007